

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TAHUN AKADEMIK 2022/2023



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**
Kampus UPMI Terpadu: Jl. Balai Desa, Marindal Dua, Kec. Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20149

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA	No.Dok	010/UPM/SPMI-UPMI
	Revisi	01
	Tgl Eff	1 Agustus 2020

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia T.A 2022/2023

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini telah diperiksa dan disahkan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai bentuk evaluasi dan komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.

Medan, 12 November 2023

<p>Menyetujui, Dekan Fakultas Hukum</p> <p></p> <p>Zetria Errina, SH.,M.Hum</p>	<p>Mengetahui, Ketua Unit Penjaminan Mutu</p> <p></p> <p>Dr. Reza Nurul Ihsan, S.E, S.H., M.M., M.H</p>
--	--

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini merupakan bagian penting dari siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas Hukum UPMI, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Operasional (RENOP) Tahun Akademik 2022/2023. Audit ini dilaksanakan dengan pendekatan sistematis, objektif, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (continuous improvement). Fokus audit mencakup bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, tata kelola, sarana prasarana, dan kerja sama kelembagaan. Melalui pelaksanaan AMI ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana tridharma memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya budaya mutu dan komitmen terhadap prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu). Hasil AMI Tahun Akademik 2022/2023 menunjukkan bahwa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan secara efektif dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 88,6%, yang mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola akademik yang bermutu dan akuntabel. Meskipun demikian, beberapa rekomendasi perbaikan telah disusun untuk meningkatkan efektivitas sistem mutu, antara lain penguatan digitalisasi dokumen mutu, peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi dan studi lanjut, serta optimalisasi sistem pembelajaran berbasis teknologi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum UPMI, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Gugus Kendali Mutu (GKM), serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan audit ini. Sinergi dan kerja sama seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Semoga laporan ini menjadi sarana refleksi bersama untuk memperkuat komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum, serta menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan RENOP Tahun Akademik 2024/2025.

Medan, 12 November 2023

Hormat kami,

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia



Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E, S.H., M.M., M.H

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem **Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan. Kegiatan ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** serta standar mutu internal universitas. Pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan siklus **PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu)** yang menjadi kerangka dasar sistem mutu di lingkungan UPMI.

Dalam konteks Fakultas Hukum, kegiatan AMI memiliki peran strategis sebagai alat ukur efektivitas implementasi **Rencana Operasional (RENOP)** yang setiap tahunnya diturunkan dari **Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum UPMI 2020–2025**. Tahun Akademik 2022/2023 menjadi periode penting karena berada pada fase *reposisi dan konsolidasi*, yaitu tahapan yang berfokus pada penguatan tata kelola akademik, penataan sistem pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya riset hukum dan pengabdian berbasis hasil penelitian. Oleh sebab itu, pelaksanaan audit mutu tahun ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENOP Program Studi Ilmu Hukum 2022/2023.

Secara umum, pelaksanaan AMI bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat keterlaksanaan kegiatan tridharma dan pengelolaan akademik di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI. Hasil audit diharapkan dapat menjadi dasar bagi proses evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Melalui audit ini, lembaga juga memperoleh informasi obyektif mengenai tingkat kepatuhan terhadap standar

mutu, efektivitas tata kelola, serta area yang masih memerlukan perbaikan.

1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjadikan mutu sebagai budaya organisasi dan landasan dalam seluruh aktivitas akademik. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang mengacu pada ketentuan nasional dan standar internal universitas. Audit Mutu Internal merupakan instrumen utama dalam menjamin tercapainya standar mutu tersebut.

Dalam implementasinya, audit mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran kelembagaan (*organizational learning*) bagi seluruh unsur sivitas akademika. Melalui audit, Fakultas Hukum UPMI dapat menilai konsistensi pelaksanaan program, menelusuri akar penyebab ketidaksesuaian, serta menemukan peluang peningkatan yang relevan dengan dinamika perubahan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dengan kata lain, AMI bukan semata kegiatan penilaian, tetapi juga merupakan refleksi bersama terhadap kinerja lembaga dalam upaya mencapai visi dan misi institusional.

Tahun akademik 2022/2023 dipilih sebagai fokus audit karena merupakan tahun implementasi penuh dari RENOP Program Studi Ilmu Hukum yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 155/06.D/FH-UPMI/VIII/2023. Dokumen tersebut memuat sasaran operasional, indikator kinerja utama (IKU), dan program tridharma yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, hasil audit tahun ini akan menjadi acuan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan RENOP serta dasar penyusunan RENOP tahun berikutnya.

2. Tujuan Audit Mutu Internal

Secara khusus, tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. **Menilai tingkat keterlaksanaan program tridharma perguruan tinggi** (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sesuai dengan rencana dan standar mutu yang berlaku.
2. **Mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagaimana ditetapkan dalam RENOP Program Studi Ilmu Hukum Tahun Akademik 2022/2023.
3. **Mengidentifikasi ketidaksesuaian (non-conformity)**, kelemahan, dan peluang peningkatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan.
4. **Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)** dalam bidang akademik, manajerial, dan tata kelola kelembagaan.
5. **Menjamin efektivitas penerapan siklus PPEPP** dalam sistem SPMI Fakultas Hukum UPMI agar mutu program studi selalu terjaga dan meningkat setiap tahun.

3. Landasan Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan AMI berlandaskan pada beberapa regulasi dan dokumen kelembagaan, antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

- Manual Mutu dan Dokumen SPMI UPMI Dok. 02.LP3M.SPMI-UPMI.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum UPMI 2020–2025.
- Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI Tahun Akademik 2022/2023.

Dengan berpedoman pada landasan tersebut, pelaksanaan audit dilaksanakan secara objektif, independen, dan profesional, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta keterlibatan seluruh pihak yang diaudit.

4. Sasaran dan Manfaat Audit

Sasaran utama audit ini adalah seluruh bidang kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan tridharma di Program Studi Ilmu Hukum. Bidang-bidang tersebut mencakup: tata kelola organisasi, kurikulum dan pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan, dan kerja sama kelembagaan.

Adapun manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

1. Sebagai sarana **evaluasi kinerja tahunan** program studi.
2. Sebagai **bahan refleksi dan perencanaan** penyusunan RENOP tahun berikutnya.
3. Sebagai **bukti implementasi SPMI** yang terukur bagi keperluan akreditasi dan audit eksternal.
4. Sebagai **mekanisme peningkatan kesadaran mutu** bagi seluruh sivitas akademika.
5. Sebagai **instrumen pengendalian internal** terhadap efektivitas pelaksanaan tridharma dan tata kelola Fakultas Hukum.

5. Prinsip dan Pendekatan Audit

Pelaksanaan AMI Program Studi Ilmu Hukum Tahun Akademik 2022/2023 mengacu pada prinsip-prinsip audit mutu pendidikan tinggi yang meliputi:

- **Independensi:** Auditor bersikap objektif dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- **Keterbukaan:** Proses audit dilaksanakan dengan komunikasi yang konstruktif antara auditor dan auditee.
- **Faktualitas:** Penilaian didasarkan pada bukti objektif, data, dan dokumen yang terverifikasi.
- **Peningkatan Berkelanjutan:** Audit berorientasi pada rekomendasi perbaikan, bukan sekadar penilaian administratif.

Pendekatan audit dilakukan secara **komprehensif dan partisipatif**, melibatkan seluruh unsur pimpinan Fakultas Hukum, dosen, tenaga kependidikan, serta Gugus Kendali Mutu (GKM). Selain audit dokumen, auditor juga melakukan observasi lapangan, wawancara, serta penelusuran data capaian pada sistem informasi akademik (SIAKAD) dan basis data mutu LP3M.

6. Harapan dan Arah Pelaksanaan Audit

Melalui pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2022/2023 ini, diharapkan Program Studi Ilmu Hukum mampu:

1. Membangun budaya mutu yang kokoh dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan efektivitas tata kelola akademik yang akuntabel dan transparan.
3. Memastikan kesesuaian antara capaian pembelajaran (CPL dan CPMK) dengan profil lulusan.
4. Memperkuat kinerja penelitian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik.

5. Menjamin bahwa seluruh proses akademik telah mendukung pencapaian visi Fakultas Hukum UPMI sebagai **pusat pengembangan ilmu hukum yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing nasional.**

Dengan demikian, bagian **Pendahuluan** ini menjadi dasar konseptual bagi keseluruhan pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023. Laporan hasil audit berikutnya akan menguraikan temuan, capaian, serta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan **RENOP Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI.**

II. RUANG LINGKUP AUDIT

Pelaksanaan **Audit Mutu Internal (AMI)** Tahun Akademik 2022/2023 pada **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)** mencakup seluruh aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi serta tata kelola kelembagaan yang berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup audit ditetapkan berdasarkan standar mutu internal UPMI, indikator kinerja yang tertuang dalam **Rencana Operasional (RENOP) Tahun Akademik 2022/2023**, serta ketentuan nasional yang diatur dalam **Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**.

Audit ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar, prosedur, dan target mutu yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penguatan untuk peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Secara umum, ruang lingkup AMI Tahun Akademik 2022/2023 meliputi sembilan bidang utama sebagai berikut:

1. Bidang Akademik dan Kurikulum

Bidang ini berfokus pada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi akademik yang diterapkan di Program Studi Ilmu Hukum. Fokus utama audit mencakup:

- Implementasi kurikulum berbasis **Outcome-Based Education (OBE)** yang selaras dengan **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8**.
- Kesesuaian **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Course Learning Outcomes (CLO).
- Efektivitas metode pembelajaran seperti *case study*, *problem-based learning*, serta

penerapan **Learning Management System (LMS)** dalam kuliah daring.

- Kepatuhan terhadap standar **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** dalam penyusunan beban studi, evaluasi hasil belajar, dan supervisi tesis mahasiswa.

Audit pada bidang ini menggunakan **RENOP Bab III dan IV** sebagai dokumen acuan, serta data pendukung berupa RPS, jadwal perkuliahan, berita acara perkuliahan, dan hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa.

2. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Bidang ini mengkaji pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah oleh dosen dan mahasiswa. Fokus audit mencakup:

- Jumlah, tema, dan kualitas penelitian dosen yang didanai secara internal maupun eksternal.
- Relevansi topik penelitian terhadap kebutuhan pembangunan hukum nasional, kebijakan publik, dan visi program studi.
- Jumlah dan mutu publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2–4) serta kontribusi dosen dalam penulisan buku ajar hukum.
- Kegiatan seminar, kolokium, dan forum ilmiah lainnya sebagai wahana diseminasi hasil riset.

Audit menilai kesesuaian capaian dengan target **10 penelitian dan 5 publikasi ilmiah** sebagaimana ditetapkan dalam **RENOP Bab III.2**, serta mengevaluasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan riset berbasis pembelajaran (*research-based learning*).

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Audit pada bidang ini bertujuan menilai pelaksanaan kegiatan PkM yang berorientasi pada

penerapan hasil riset hukum untuk masyarakat. Fokus evaluasi meliputi:

- Jumlah dan kualitas kegiatan PkM yang dilaksanakan pada tahun akademik berjalan.
- Keterkaitan antara tema PkM dengan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
- Dampak sosial, hukum, dan edukatif dari kegiatan penyuluhan hukum, klinik konsultasi, maupun advokasi regulasi daerah.
- Dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan, termasuk bukti kerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga hukum.

Penilaian dilakukan berdasarkan **RENOP Bab III.3**, dengan indikator utama “terlaksananya lima kegiatan PkM berbasis hasil riset hukum”.

4. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Fokus audit pada bidang SDM adalah menilai kapasitas, kompetensi, dan produktivitas dosen serta tenaga kependidikan. Aspek yang diaudit meliputi:

- Kualifikasi akademik dosen dan kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu.
- Pelaksanaan beban tridharma minimal 12 SKS per semester bagi dosen tetap.
- Jumlah dosen bersertifikat pendidik (*serdos*) dan dosen yang sedang menempuh studi lanjut S3.
- Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dalam layanan akademik digital, administrasi, dan sistem informasi.

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada **RENOP Bab III.4**, dokumen kepegawaian, dan laporan pelatihan SDM, dengan indikator keberhasilan minimal 85% realisasi dari target pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan.

5. Bidang Tata Kelola dan Keuangan

Audit bidang ini mencakup efektivitas sistem tata pamong, transparansi pengelolaan keuangan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Fokus audit meliputi:

- Implementasi struktur organisasi Fakultas Hukum dan fungsi koordinasi antarunit.
- Prosedur pengelolaan keuangan berbasis prinsip **akuntabilitas dan transparansi publik**.
- Pemanfaatan sistem digital seperti **SIAKAD dan e-finance** dalam pelaporan keuangan.
- Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Standar audit mengacu pada **RENOP Bab III.7**, dengan target realisasi anggaran minimal 90% dari rencana kerja tahunan serta pelaporan keuangan yang telah diaudit internal oleh LP3M UPMI.

6. Bidang Kerja Sama Institusional

Ruang lingkup audit pada bidang ini berfokus pada efektivitas kerja sama akademik dan profesional yang dijalin oleh program studi. Aspek yang dievaluasi antara lain:

- Jumlah **Memorandum of Understanding (MoU)** dan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang aktif.
- Implementasi kegiatan bersama seperti *joint research, guest lecture, student exchange*, dan kegiatan seminar nasional.
- Relevansi kerja sama dengan peningkatan mutu tridharma serta reputasi akademik Fakultas Hukum.

Audit menggunakan **RENOP Bab III.5** sebagai acuan dan mengevaluasi capaian target minimal **3 MoU aktif dan 2 penelitian kolaboratif** pada tahun berjalan.

7. Bidang Penjaminan Mutu

Bidang ini merupakan inti dari pelaksanaan AMI, dengan fokus pada keberlangsungan siklus mutu internal yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Aspek yang diaudit mencakup:

- Pembentukan dan kinerja **Gugus Kendali Mutu (GKM)** program studi.
- Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) periode sebelumnya dan tindak lanjut hasil audit.
- Efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) rutin setiap semester.
- Keberfungsian instrumen SPMI, termasuk manual, formulir, dan standar mutu yang berlaku.

Bidang ini menggunakan **RENOP Bab III.6** sebagai acuan utama, dengan tolok ukur tersusunnya **Laporan Hasil Audit Mutu Internal (LHAMI)** dan **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** tahunan.

8. Bidang Sarana dan Prasarana Akademik

Fokus audit pada bidang ini adalah memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana pembelajaran, fasilitas pendukung, serta infrastruktur teknologi informasi. Aspek penilaian meliputi:

- Ketersediaan ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium hukum, dan fasilitas pendukung.
- Kondisi serta pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
- Aksesibilitas terhadap **perpustakaan digital (e-library)** dan sumber referensi hukum daring.
- Program modernisasi fasilitas pembelajaran untuk mendukung perkuliahan berbasis

OBE.

Evaluasi dilakukan berdasarkan **RENOP Bab III.7**, dengan target minimal 100% fasilitas dasar berfungsi optimal dan 90% implementasi program penguatan infrastruktur akademik.

9. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Audit bidang ini bertujuan menilai efektivitas pelayanan akademik dan pembinaan karier mahasiswa serta pemantauan alumni. Fokus audit meliputi:

- Tingkat kelulusan tepat waktu (≤ 2 tahun) dan IPK rata-rata lulusan ($\geq 3,30$).
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan *soft skills*, etika profesi, dan kepemimpinan mahasiswa.
- Keberfungsiannya **Ikatan Alumni Fakultas Hukum UPMI** sebagai wadah jejaring profesional.
- Pelaksanaan **Tracer Study** untuk memantau serapan kerja dan relevansi kompetensi lulusan di dunia kerja.
- Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, administrasi, dan sarana pembelajaran.

Penilaian mengacu pada **RENOP Bab IV** dengan target capaian minimal 80% kepuasan mahasiswa dan 85% kelulusan tepat waktu.

Kesimpulan Ruang Lingkup

Secara keseluruhan, sembilan bidang audit tersebut mencerminkan seluruh komponen pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Fakultas Hukum UPMI**. Hasil audit diharapkan dapat:

1. Memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual pelaksanaan program studi.
2. Mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan dan tindak lanjut perbaikan.
3. Menjadi dasar perumusan kebijakan mutu serta penyusunan **Rencana Operasional (RENOP) Tahun Akademik 2023/2024.**

Audit Mutu Internal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Fakultas Hukum UPMI dalam mewujudkan **budaya mutu akademik yang berkelanjutan**, selaras dengan visi lembaga untuk menjadi pusat unggulan pengembangan ilmu hukum yang berdaya saing nasional dan global.

III. METODOLOGI AUDIT

Pelaksanaan **Audit Mutu Internal (AMI)** Tahun Akademik 2022/2023 pada **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)** dilakukan melalui pendekatan ilmiah, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Metodologi audit dirancang untuk menjamin obyektivitas, transparansi, dan keterukuran dalam proses penilaian terhadap seluruh komponen tridharma perguruan tinggi, meliputi aspek akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, tata kelola, sarana-prasarana, serta kepuasan stakeholder.

Audit ini dilaksanakan oleh **tim auditor internal LP3M UPMI** bekerja sama dengan **Gugus Kendali Mutu (GKM)** Program Studi Ilmu Hukum. Proses audit berlangsung selama bulan **Agustus 2023**, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Hukum, dosen tetap, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta perwakilan alumni dan mitra kerja sama sebagai responden dan sumber data. Metodologi audit disusun berdasarkan prinsip **efektivitas, efisiensi, objektivitas, dan keterlibatan seluruh unsur sivitas akademika**. Prosedur ini mengacu pada standar mutu internal UPMI dan tahapan **siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** yang menjadi dasar implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan universitas.

A. Pendekatan dan Prinsip Audit

Metode pelaksanaan AMI mengedepankan pendekatan **evaluatif dan partisipatif**, di mana auditor tidak hanya berperan sebagai penilai, tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan mutu. Prinsip utama yang digunakan dalam pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

- 1. Independensi dan Objektivitas** Auditor harus bebas dari konflik kepentingan, bersikap netral, dan tidak memihak kepada pihak manapun. Setiap temuan audit

disusun berdasarkan bukti faktual yang terverifikasi, bukan asumsi pribadi.

2. **Keterbukaan dan Kolaborasi** Audit dilaksanakan dengan komunikasi terbuka antara auditor dan auditee (pihak yang diaudit). Proses diskusi dilakukan secara konstruktif untuk memahami konteks dan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.
3. **Berbasis Bukti (Evidence-Based Audit)** Seluruh hasil penilaian harus didukung oleh bukti konkret berupa dokumen, data, laporan kegiatan, dan hasil wawancara. Tanpa bukti tertulis atau terverifikasi, temuan tidak dapat dinyatakan valid.
4. **Keterlacakkan (Traceability)** Setiap data dan informasi yang digunakan dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya, baik berupa dokumen resmi maupun rekaman kegiatan akademik, sehingga menjamin integritas proses audit.
5. **Relevansi dan Keterukuran (SMART Principle)** Setiap indikator yang diaudit memiliki sasaran yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* sesuai dengan target RENOP Tahun Akademik 2022/2023.
6. **Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)** Audit mutu tidak berorientasi pada penilaian atau temuan kesalahan, melainkan untuk menemukan potensi peningkatan mutu agar setiap unit kerja dapat melakukan *continuous improvement*.
7. **Kerahasiaan (Confidentiality)** Semua informasi yang diperoleh selama proses audit bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu akademik Fakultas Hukum UPMI.

B. Pendekatan Metodologis

Metodologi audit dalam AMI 2022/2023 menggabungkan pendekatan **kuantitatif** (data terukur dari IKU, tabel capaian, dan laporan kegiatan) dan **kualitatif** (analisis deskriptif, wawancara, serta interpretasi hasil survei kepuasan). Pendekatan ini bertujuan agar hasil audit tidak hanya menggambarkan angka-angka pencapaian, tetapi juga menilai konteks, proses, dan

dampak yang terjadi di lapangan.

Tiga pendekatan metodologis yang digunakan meliputi:

- 1. Pendekatan Dokumenter (Documentary Approach)** Auditor melakukan telaah mendalam terhadap seluruh dokumen akademik, administratif, dan keuangan, termasuk:
 - Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Ilmu Hukum 2022/2023;
 - Dokumen kurikulum dan RPS;
 - Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - Laporan keuangan semesteran;
 - Laporan kegiatan mahasiswa dan tracer study;
 - Bukti pelaksanaan Monev dan AMI sebelumnya;
 - Notulen rapat, berita acara, dan laporan evaluasi dosen-mahasiswa.
- 2. Pendekatan Partisipatif (Participatory Evaluation)** Melibatkan seluruh unsur pelaksana tridharma dalam proses audit melalui wawancara mendalam, *focus group discussion (FGD)*, serta survei daring untuk menjaring persepsi, hambatan, dan aspirasi sivitas akademika.
- 3. Pendekatan Analitis dan Komparatif (Analytical Comparative Approach)** Auditor membandingkan antara target kinerja (IKU) yang ditetapkan dalam RENOP dengan capaian aktual di lapangan. Ketidaksesuaian yang ditemukan dianalisis penyebabnya melalui metode *Root Cause Analysis (RCA)* untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan realistik.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil audit yang akurat dan valid, digunakan beberapa teknik pengumpulan

data sebagai berikut:

1. **Wawancara dan Observasi Langsung** Dilakukan kepada pimpinan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak eksternal seperti alumni dan mitra kerja sama. Wawancara difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma, kendala dalam proses pembelajaran, efektivitas kerja sama, serta implementasi sistem mutu. Observasi lapangan dilakukan untuk menilai kondisi fisik ruang kuliah, laboratorium hukum, fasilitas ICT, dan perpustakaan digital.
2. **Telaah dan Analisis Dokumen (Document Review)** Auditor memverifikasi kesesuaian antara dokumen rencana (RENOP), pelaksanaan (laporan kegiatan), dan hasil (laporan kinerja dan bukti fisik). Setiap temuan didukung dengan *evidence* seperti notulen rapat, daftar hadir, surat tugas, laporan penelitian, dan foto kegiatan.
3. **Kuesioner dan Survei Evaluasi** Survei dilakukan terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna lulusan (stakeholder) untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan akademik, pembelajaran, sarana prasarana, dan sistem informasi. Hasil survei menjadi dasar dalam menilai efektivitas tata kelola dan mutu pelayanan Fakultas Hukum.
4. **Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif** Data kuantitatif diolah dalam bentuk persentase capaian IKU, tabel kinerja, dan grafik tren capaian. Data kualitatif dianalisis secara tematik dengan teknik *content analysis* untuk memahami persepsi, tantangan, dan peluang peningkatan mutu.
5. **Validasi dan Triangulasi Data** Untuk menjamin keabsahan hasil audit, auditor menerapkan *triangulasi sumber dan metode*, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan survei guna memastikan konsistensi data.

D. Tahapan Pelaksanaan Audit

Proses AMI Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan melalui empat tahapan utama yang terintegrasi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Tahap Persiapan Audit

Pada tahap ini dilakukan:

- Penetapan **tim auditor internal** oleh LP3M UPMI;
- Penyusunan jadwal audit, ruang lingkup, dan kriteria penilaian;
- Penyusunan **instrumen audit** yang meliputi formulir checklist, panduan wawancara, dan format laporan hasil audit (LHAMI);
- Koordinasi awal dengan pihak auditee (Ketua Prodi, dosen, dan unit terkait);
- Sosialisasi pelaksanaan AMI agar seluruh pihak memahami tujuan dan mekanisme audit.

Tujuan utama tahap ini adalah memastikan kesiapan dokumen dan sumber daya agar pelaksanaan audit berjalan efektif dan sesuai waktu yang ditetapkan.

2. Tahap Pelaksanaan Audit Lapangan

Tahap ini meliputi kegiatan verifikasi data dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tridharma. Kegiatan audit lapangan dilakukan melalui:

- Wawancara langsung dengan pimpinan, dosen, dan mahasiswa;
- Pemeriksaan dokumen fisik dan digital (RPS, laporan penelitian, laporan PkM, data keuangan, MoU, dan notulen kegiatan);
- Observasi sarana dan prasarana kampus;
- Diskusi terbuka antara auditor dan auditee untuk klarifikasi temuan.

Selama tahap ini, auditor mencatat seluruh temuan dalam **Formulir Audit (FA-AMI)** dan memberi kategori: sesuai (C), sesuai dengan catatan (CC), tidak sesuai (NC), atau observasi (OB).

3. Tahap Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHAMI)

Setelah audit lapangan selesai, auditor menyusun **Laporan Hasil Audit Mutu Internal (LHAMI)** yang berisi:

- Ringkasan capaian dan ketidaksesuaian terhadap standar;
- Analisis akar penyebab ketidaktercapaian;
- Rekomendasi perbaikan (Corrective Action Plan);
- Penilaian umum kinerja mutu program studi;
- Tabel rekapitulasi temuan dan bukti pendukung.

LHAMI disusun secara objektif, sistematis, dan terukur sesuai format standar LP3M UPMI, kemudian diserahkan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti.

4. Tahap Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Tindak Lanjut

Tahap akhir audit adalah pelaksanaan **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua GKM, dan auditor internal. Dalam rapat ini dibahas:

- Hasil keseluruhan audit;
- Rekomendasi perbaikan;
- Penetapan **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** untuk perbaikan mutu di tahun berikutnya;
- Evaluasi efektivitas tindak lanjut audit tahun sebelumnya.

Hasil RTM menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen dan digunakan dalam penyusunan **Rencana Operasional (RENOP) Tahun Akademik 2023/2024**, sehingga siklus peningkatan mutu dapat berjalan secara berkelanjutan.

E. Waktu dan Penanggung Jawab Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Persiapan Audit dan Sosialisasi	Juli – Agustus 2023	LP3M & GKM Fakultas Hukum
Audit Lapangan dan Verifikasi Data	September 2023	Tim Auditor Internal
Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHAMI)	Oktober 2023	Ketua Tim Auditor & LP3M
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	November 2023	Dekan Fakultas Hukum & LP3M
Finalisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Desember 2023	Ketua Prodi & GKM

F. Hasil yang Diharapkan dari Metodologi Audit

Dengan penerapan metodologi audit yang sistematis dan partisipatif ini, diharapkan:

1. Seluruh kegiatan tridharma di Program Studi Ilmu Hukum dapat dinilai secara komprehensif dan objektif.
2. Munculnya budaya evaluatif di kalangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari *quality culture*.
3. Tersedianya data mutu yang valid dan terukur sebagai dasar penyusunan kebijakan

akademik dan perencanaan strategis.

4. Terbentuknya mekanisme umpan balik yang efektif antara auditor, pimpinan, dan pelaksana program studi.
5. Terwujudnya sistem mutu internal Fakultas Hukum yang berkesinambungan, adaptif terhadap perkembangan pendidikan hukum nasional, dan berorientasi pada keunggulan akademik.

IV. HASIL AUDIT DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Bab ini memuat hasil audit mutu internal terhadap pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Tahun Akademik 2022/2023. Analisis dilakukan terhadap sembilan bidang utama tridharma dan tata kelola pendidikan tinggi yang tercantum dalam **Rencana Operasional (RENOP)**.

Setiap bidang dinilai berdasarkan target kuantitatif dan kualitatif yang telah ditetapkan dalam RENOP 2022/2023, dan dibandingkan dengan capaian aktual hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penilaian mutu dilakukan menggunakan empat kategori kinerja:

- **Sangat Baik (SB)** = capaian $\geq 100\%$ target
- **Baik (B)** = capaian 90–99% target
- **Cukup Baik (CB)** = capaian 80–89% target
- **Perlu Peningkatan (PP)** = capaian $< 80\%$ target

Data yang digunakan bersumber dari laporan kegiatan tridharma, dokumen evaluasi dosen dan mahasiswa, laporan keuangan, hasil survei kepuasan stakeholder, serta wawancara mendalam dengan pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.

1. Bidang Akademik dan Kurikulum

Target Mutu

80% mata kuliah menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE); seluruh **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** telah tersusun dengan format standar sesuai **KKNI Level 8** dan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)**.

Capaian Audit

Hasil audit menunjukkan bahwa 85% RPS telah sepenuhnya sesuai dengan format OBE dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta course learning outcomes (CLO). Sebanyak 15% RPS masih dalam proses revisi, terutama pada mata kuliah baru yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kontemporer seperti Hukum Siber, Lingkungan, dan Hak Asasi Manusia.

Analisis dan Evaluasi

Penerapan kurikulum berbasis OBE menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun akademik sebelumnya (2022/2023), di mana capaian OBE baru mencapai 68%. Perubahan ini merupakan hasil dari kegiatan workshop kurikulum dan RPS yang dilaksanakan pada awal semester ganjil serta pendampingan langsung oleh tim GKM Fakultas Hukum. Meskipun demikian, masih ditemukan variasi dalam kedalaman asesmen CPL antar mata kuliah. Beberapa dosen belum sepenuhnya menerapkan metode evaluasi berbasis performance-based assessment.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Sangat Baik (Capaian 85% dari target 80%) **Catatan:** Pelaksanaan pelatihan lanjutan OBE dan workshop asesmen pembelajaran perlu diperluas untuk dosen baru dan dosen tidak tetap. **Rekomendasi:** Tahun 2024 diarahkan pada tahap OBE Mapping Integration, yaitu pemetaan keterkaitan CPL–CPMK–RPS–Asesmen melalui sistem digital berbasis LMS.

2. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Target Mutu

≥10 penelitian dosen aktif dan minimal 5 publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2–4).

Capaian Audit

Audit mencatat 9 penelitian hukum telah terlaksana dengan berbagai sumber pendanaan (internal Fakultas Hukum, LPPM UPMI, dan kolaborasi eksternal). Publikasi ilmiah dosen mencapai 7 artikel yang telah terbit di jurnal terakreditasi Sinta 2–4 dan prosiding nasional. Beberapa publikasi menonjol di antaranya membahas reformasi hukum nasional, perlindungan data pribadi, serta sistem peradilan berbasis digital.

Analisis dan Evaluasi

Meskipun jumlah penelitian sedikit di bawah target (90% dari rencana), namun kualitas penelitian mengalami peningkatan signifikan, ditandai dengan meningkatnya sitasi dan kolaborasi lintas lembaga. Publikasi ilmiah juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan kuantitas dibandingkan tahun sebelumnya (hanya 4 artikel).

Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan dana hibah penelitian internal dan rendahnya partisipasi dosen muda dalam penelitian kompetitif eksternal.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Baik (Capaian 90%) **Catatan:** Jumlah penelitian internal masih perlu ditingkatkan. **Rekomendasi:**

- Mendorong terbentuknya Kelompok Riset Hukum Publik dan Reformasi Peraturan.
- Meningkatkan kolaborasi penelitian lintas program studi dan lintas universitas.
- Mengadakan pelatihan penulisan jurnal internasional bereputasi (Scopus-indexed).

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Target Mutu

Minimal 5 kegiatan PkM berbasis hasil penelitian hukum yang terdokumentasi dengan baik.

Capaian Audit

Audit menunjukkan terdapat 6 kegiatan PkM selama tahun akademik 2022/2023, di antaranya:

- 1. Sosialisasi Hukum Siber dan Pencegahan Hoaks** di Medan Johor.
- 2. Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen** bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Medan.
- 3. Pelatihan Penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah** bersama DPRD Kabupaten Simalungun.
- 4. Klinik Hukum Masyarakat** bagi warga kurang mampu.
- 5. Advokasi Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak.**
- 6. Seminar Reformasi Regulasi Nasional** (kolaborasi dengan Mahkamah Agung).

Analisis dan Evaluasi

Seluruh kegiatan PkM berbasis hasil riset hukum dosen, memiliki laporan dampak sosial dan dokumentasi lengkap. Audit menilai aspek keberlanjutan (sustainability) PkM mulai menunjukkan hasil positif, di mana dua mitra PkM tahun lalu telah mengajukan kerja sama lanjutan.

Namun, wilayah jangkauan kegiatan masih terkonsentrasi di Kota Medan dan sekitarnya.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Sangat Baik (Capaian 120%) **Catatan:** PkM dengan pemerintah daerah

perlu diperluas ke wilayah hukum di luar Medan, seperti Nias, Langkat, dan Tapanuli Selatan.

Rekomendasi:

- Pengembangan Community Service Cluster berbasis tema hukum digital, HAM, dan kebijakan publik.
- Integrasi PkM ke dalam mata kuliah berbasis Experiential Learning.

4. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Target Mutu

Terdapat minimal 3 dosen bersertifikat pendidik aktif dan peningkatan produktivitas akademik.

Capaian Audit

Tiga dosen tetap telah memiliki sertifikasi pendidik (Serdos), sementara satu dosen sedang dalam proses pengajuan pada tahun 2024. Dosen juga melaksanakan beban tridharma sesuai ketentuan minimal 12 SKS per semester. Tenaga kependidikan mengikuti dua pelatihan digital administrasi akademik yang diselenggarakan oleh LP3M UPMI.

Analisis dan Evaluasi

Tingkat kualifikasi SDM tergolong baik. Proporsi dosen bergelar doktor meningkat menjadi 40% dari total dosen tetap, dan 60% lainnya sedang melanjutkan studi S3. Namun, audit menemukan bahwa beban administrasi akademik masih tinggi karena sistem digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Tercapai (100%) **Rekomendasi:**

- Mendorong peningkatan jumlah dosen bergelar doktor melalui beasiswa LPDP dan Dikti.
- Mengadakan Workshop Publikasi Internasional dan Penulisan Buku Referensi.
- Mengoptimalkan pembagian beban administrasi untuk efisiensi kerja dosen.

5. Bidang Tata Kelola dan Keuangan

Target Mutu

Realisasi anggaran minimal 90% dengan pelaporan tepat waktu.

Capaian Audit

Realisasi keuangan mencapai 92% dari rencana kerja tahunan, dan seluruh laporan keuangan semesteran disampaikan tepat waktu kepada rektorat. Audit internal menunjukkan tidak ada temuan penyimpangan administrasi keuangan.

Analisis dan Evaluasi

Manajemen keuangan Fakultas Hukum UPMI tergolong efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem pelaporan sudah menggunakan SIAKAD finance, meskipun integrasi penuh antarunit administrasi belum optimal. Proses penyusunan anggaran sudah berbasis performance-based budgeting (PBB), sehingga setiap alokasi dana dikaitkan dengan target kinerja program.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Sangat Baik (Capaian 92%) **Catatan:** Diperlukan peningkatan interoperabilitas antara SIAKAD akademik dan sistem keuangan. **Rekomendasi:**

- Pengembangan modul e-budgeting terintegrasi.

- Audit keuangan internal dilakukan dua kali per tahun agar pengendalian mutu lebih efektif.

6. Bidang Kerja Sama dan Networking

Target Mutu

Minimal 3 MoU aktif dan 2 penelitian kolaboratif (joint research).

Capaian Audit

Audit mencatat adanya 4 MoU aktif dan 1 penelitian kolaboratif dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang sedang berlangsung. Kerja sama lain dijalankan dengan Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Analisis dan Evaluasi

Kegiatan kerja sama sudah berjalan efektif dalam bentuk guest lecture, joint seminar, dan pertukaran naskah akademik. Namun, kegiatan joint research masih terbatas karena perbedaan jadwal akademik antarinstansi mitra.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Baik (Capaian 90%). **Catatan:** Capaian sudah memenuhi target MoU, tetapi perlu peningkatan realisasi kegiatan bersama. **Rekomendasi:**

- Membentuk Forum Kolaborasi Penelitian Hukum ASEAN.
- Menjadwalkan kegiatan Visiting Professor Program minimal dua kali setahun.

7. Bidang Penjaminan Mutu

Target Mutu

Pelaksanaan satu kali Audit Mutu Internal (AMI) penuh beserta laporan tindak lanjut.

Capaian Audit

Audit Mutu Internal 2022/2023 telah dilaksanakan secara lengkap oleh LP3M UPMI dan menghasilkan Laporan Hasil Audit Mutu Internal (LHAMI) serta Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disahkan oleh Senat Fakultas Hukum.

Analisis dan Evaluasi

Proses audit berjalan sesuai jadwal dan standar mutu UPMI. Evaluasi menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap siklus PPEPP di tingkat program studi. Namun, proses administrasi audit masih dilakukan secara manual, sehingga pelaporan membutuhkan waktu lebih lama.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Sangat Baik (Capaian 100%) **Rekomendasi:**

- Mengembangkan sistem e-Audit berbasis Google Workspace atau Moodle.
- Melatih auditor internal baru agar siklus AMI tetap berkelanjutan.

8. Bidang Sarana dan Prasarana Akademik

Target Mutu

100% fasilitas dasar (ruang kuliah, laboratorium hukum, dan perpustakaan digital) berfungsi optimal.

Capaian Audit

95% fasilitas telah berfungsi dengan baik. Seluruh ruang kuliah dilengkapi proyektor, koneksi Wi-Fi, dan sistem absensi digital. Namun, bandwidth internet masih perlu ditingkatkan, dan ruang baca hukum digital masih terbatas.

Analisis dan Evaluasi

Secara umum, sarana prasarana mendukung proses pembelajaran modern. Pemanfaatan e-library meningkat 40% dari tahun sebelumnya. Kendala utama adalah keterbatasan akses sumber hukum internasional, seperti HeinOnline dan LexisNexis.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Cukup Baik (Capaian 95%) **Rekomendasi:**

- Menambah anggaran untuk pengadaan database hukum internasional.
- Mengembangkan smart classroom untuk kegiatan kuliah hibrida (blended learning).

9. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Target Mutu

$\geq 85\%$ lulusan tepat waktu dan IPK rata-rata $\geq 3,30$.

Capaian Audit

Sebanyak 87% mahasiswa lulus tepat waktu, dengan IPK rata-rata 3,41. Hasil tracer study menunjukkan bahwa 78% alumni bekerja di bidang hukum (peradilan, kejaksaan, advokat, dosen), dan 22% bekerja di bidang lain yang relevan (pemerintahan, LSM, dan konsultansi hukum).

Analisis dan Evaluasi

Kinerja akademik mahasiswa tergolong baik, ditunjang oleh sistem pembimbingan tesis yang efisien. Program soft skills development yang dilaksanakan setiap semester turut meningkatkan kesiapan karier lulusan. Namun, ikatan alumni masih dalam tahap awal pengembangan dan perlu diperkuat secara kelembagaan.

Kesimpulan Kinerja

Kategori Kinerja: Sangat Baik (Capaian 102%). **Catatan:** Penguatan jejaring alumni dapat berkontribusi terhadap kegiatan magang, tracer study, dan PkM. **Rekomendasi:**

- Membentuk Ikatan Alumni Magister Hukum (IKA-MIH UPMI) resmi dengan AD/ART dan sekretariat aktif.
- Mengadakan Career Talk Series bersama alumni sukses setiap semester.

Ringkasan Umum Capaian IKU Tahun Akademik 2022/2023

No	Bidang Audit	Capaian (%)	Kategori Kinerja	Rekomendasi Utama
1	Akademik & Kurikulum	85	Sangat Baik	Pelatihan lanjutan OBE
2	Penelitian & Publikasi	90	Baik	Dorong hibah riset kolaboratif
3	PkM	120	Sangat Baik	Perluasan wilayah kegiatan
4	SDM	100	Tercapai	Beasiswa S3 dan publikasi Scopus
5	Tata Kelola &	92	Sangat Baik	Integrasi SIAKAD–Finance

	Keuangan			
6	Kerja Sama & Networking	90	Baik	Forum riset hukum ASEAN
7	Penjaminan Mutu	100	Sangat Baik	Implementasi e-Audit
8	Sarana & Prasarana	95	Cukup Baik	E-library internasional
9	Kemahasiswaan & Alumni	102	Sangat Baik	Penguatan IKA-FH UPMI

Rata-rata Capaian IKU: **97,1%**

Kategori Umum: Sangat Baik

Secara keseluruhan, hasil Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI telah melaksanakan kegiatan tridharma secara efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Capaian rata-rata 97,1% mencerminkan kinerja akademik yang konsisten, manajemen keuangan yang transparan, serta budaya riset hukum yang semakin kuat. Program studi diharapkan mempertahankan capaian ini dan fokus pada penguatan digitalisasi mutu, internasionalisasi riset, dan sinergi alumni dalam mendukung pengembangan Fakultas Hukum UPMI sebagai pusat keunggulan pendidikan hukum yang berdaya saing nasional dan global.

V. TEMUAN UTAMA AUDIT

A. Kekuatan (Strengths)

1) Komitmen pimpinan Fakultas Hukum terhadap implementasi SPMI tinggi

Uraian. Pimpinan memastikan RENOP menjadi acuan kerja seluruh unit; kewajiban berpedoman pada RENOP ditegaskan secara eksplisit, dan AMI dilaksanakan rutin dengan RTL disahkan tingkat senat. Hal ini menumbuhkan *tone at the top* yang kuat untuk budaya mutu. **Bukti & Rujukan RENOP.** Penetapan RENOP sebagai pedoman dan kewajiban seluruh unsur pelaksana; keputusan diberlakukan 21 Agustus 2023. **Implikasi IKU.** Menguatkan capaian IKU bidang penjaminan mutu dan akreditasi. Target AMI tahunan dan LED/LKPS terdorong tercapai. **RTL Singkat (PPEPP).** Penguatan *management review* per semester; integrasi dashboard mutu agar monitoring lebih real-time.

2) Pelaksanaan tridharma berjalan efektif dengan monitoring rutin

Uraian. Kegiatan pendidikan, riset, dan PkM dipantau melalui Monev; hasilnya menjadi masukan penyusunan RENOP berikutnya. **Bukti & Rujukan RENOP.** Mekanisme Monev dan pemanfaatannya untuk penyusunan RENOP selanjutnya ditegaskan. **Implikasi IKU.** Memperkuat indikator kelulusan tepat waktu, publikasi, dan kegiatan PkM yang ditargetkan tahunan. **RTL Singkat.** Standarisasi format Monev lintas-bidang (akademik, riset, PkM, sarpras) agar komparabilitas meningkat.

3) Kolaborasi dosen–mahasiswa kuat dalam penelitian dan PkM

Uraian. Kegiatan riset dan PkM dirancang melibatkan mahasiswa (research-based learning), serta didorong berbasis hasil riset. **Bukti & Rujukan RENOP.** Keterlibatan mahasiswa dalam riset dan PkM serta target output yang terukur ditegaskan pada program penelitian dan PkM.

Implikasi IKU. Kontribusi langsung pada IKU publikasi, jumlah penelitian, dan PkM terprogram. **RTL Singkat.** Membentuk *legal research cluster* tematik (Hukum Siber/HAM/Regulasi) dengan kuota asisten riset mahasiswa.

4) Reputasi akademik meningkat melalui publikasi hukum terakreditasi

Uraian. Target publikasi pada jurnal Sinta mendorong atmosfer ilmiah dan visibilitas prodi.

Bukti & Rujukan RENOP. Target dan arah peningkatan kualitas/kualitas publikasi dijabarkan eksplisit. **Implikasi IKU.** Memperkuat posisi pada indikator “Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen”. **RTL Singkat.** Klinik publikasi tahunan + *paper bootcamp* menuju Sinta 2/Scopus.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1) Digitalisasi dokumen mutu masih parsial

Akar Masalah (RCA). Proses AMI dan Monev sebagian masih manual; belum seluruhnya terintegrasi ke repositori digital terstandar. **Dampak.** Pelaporan lambat, risiko *versioning* dokumen, dan keterlacakkan bukti kurang optimal. **Bukti & Rujukan RENOP.** RENOP mendorong penguatan SPMI dan tersusunnya LHAMI/RTL; namun sarana digitalisasi mutu belum dirinci rinciannya. **RTL Singkat.** Implementasi *e-Audit* (Google Workspace/LMS) dengan *naming convention & access control* standar.

2) Sebagian dosen belum optimal menggunakan LMS

Akar Masalah. Variasi literasi digital; belum adanya *OBE-assessment toolkit* baku di LMS.

Dampak. Ketidakkonsistenan asesmen CPL/CPMK dan bukti pembelajaran.

Bukti & Rujukan RENOP. RENOP menargetkan OBE dan LMS; pencapaian OBE diprioritaskan, sehingga LMS perlu menjadi bukti primer implementasi. **RTL Singkat.** *Micro-*

training LMS per 2 minggu + helpdesk OBE-assessment; template RPS-OBE terintegrasi LMS.

3) Kurangnya tenaga administrasi bersertifikat mutu ISO/SPMI

Akar Masalah. Fokus pengembangan SDM dominan pada dosen; jalur sertifikasi staf mutu belum terprogram tahunan. **Dampak.** Beban dokumentasi menumpuk pada GKM; *turn-around time* administrasi audit meningkat. **Bukti & Rujukan RENOP.** RENOP memuat peningkatan kapasitas SDM & administrasi digital, namun kebutuhan sertifikasi mutu staf belum diukur sebagai IKU sendiri. **RTL Singkat.** Kuota minimal 2 staf/semester mengikuti pelatihan ISO 21001/SPMI dan *record management*.

C. Peluang (Opportunities)

1) Potensi kerja sama riset dengan lembaga peradilan dan kejaksaan

Uraian. Arah RENOP pada jejaring kelembagaan dan *joint activities* membuka peluang *policy-oriented research*. **Bukti & Rujukan RENOP.** Target MoU aktif dan kegiatan bersama (research/seminar) ditegaskan. **Strategi.** Paket *MoU → PKS → joint research → policy brief → PkM* untuk topik hukum aktual.

2) Dukungan kebijakan universitas terhadap sertifikasi & akreditasi

Uraian. RENOP menggariskan persiapan LED/LKPS dan audit pra-akreditasi internal. **Bukti & Rujukan RENOP.** IKU akreditasi “Baik”, persiapan dokumen akreditasi dan audit internal. **Strategi.** Sinkronisasi *e-evidence* akreditasi dengan repositori AMI untuk *single source of truth*.

3) Tren kebutuhan pendidikan hukum berbasis riset kebijakan publik

Uraian. RENOP mengarahkan riset dan PkM berbasis isu kebijakan & dampak sosial—momentum untuk diferensiasi prodi. **Bukti & Rujukan RENOP.** Penekanan PkM berbasis hasil riset dan dampak sosial. **Strategi.** *Flagship* “Legal Policy Lab” (policy brief, naskah akademik, uji publik) sebagai kanal hilirisasi riset.

D. Ancaman (Threats)

1) Persaingan ketat antarprogram magister hukum di Medan

Risiko. *Market share* calon mahasiswa berkualitas terfragmentasi; biaya pemasaran meningkat. **Mitigasi.** Diferensiasi kurikulum OBE berbasis hukum digital/kebijakan; *signature course & dual-track* tesis/praktik.

2) Keterbatasan dana penelitian eksternal dari Dikti

Risiko. Kuantitas riset kompetitif terhambat; publikasi menurun. **Mitigasi.** Diversifikasi sumber (Pemda, lembaga peradilan, CSR, kolaborasi ASEAN); *consortium grant* lintas PT.

E. Matriks Risiko (Ringkas)

Risiko Utama	Dampak	Prob.	Level	Mitigasi Prioritas
Digitalisasi mutu parsial	Medium: keterlambatan pelaporan & audit	Sedang	M	Implementasi <i>e-Audit</i> & repositori terpusat (Q1–Q2)
Adopsi LMS belum merata	Medium: bukti CPL/CPMK tak konsisten	Sedang	M	<i>Micro-training</i> LMS, <i>OBE toolkit</i> (Q1)
Staf mutu belum tersertifikasi	Medium: beban GKM tinggi	Rendah–Sedang	M	Sertifikasi ISO/SPMI untuk 2 staf/semester
Persaingan prodi se-kota	Tinggi: rekrutmen & reputasi	Sedang	M–T	Diferensiasi kurikulum, <i>signature course</i>

Dana riset eksternal terbatas	Medium-Tinggi: publikasi & IKU riset	Sedang	M-T	Konsorsium hibah & <i>policy lab</i>
-------------------------------	--------------------------------------	--------	-----	--------------------------------------

Keterangan: Prob. = Probabilitas; M = Medium; T = Tinggi.

F. Pemetaan Temuan → IKU → Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Temuan	IKU Terkait	RTL Inti (PPEPP)	Target Waktu
Komitmen SPMI tinggi	AMI tahunan; akreditasi	RTM per semester; <i>dashboard KPI</i>	Berjalan & berkesinambungan
Tridharma termonitor rutin	Publikasi, PkM, kelulusan	Standar Monev terpadu lintas-bidang	Q1
Digitalisasi mutu parsial	Penjaminan mutu	Implementasi <i>e-Audit</i> (Workspace/LMS)	Q1–Q2
Adopsi LMS belum merata	Akademik & kurikulum	<i>Micro-training + OBE toolkit</i> di LMS	Q1
SDM admin belum tersertifikasi	Layanan & mutu	Sertifikasi ISO/SPMI (≥ 2 staf/semester)	Q1–Q4
Peluang kerja sama peradilan/kejaksaan	MoU, joint research	Paket MoU→PKS→Riset→Policy brief	Q2–Q4
Persaingan prodi tinggi	Kelulusan, reputasi	<i>Signature course, legal policy lab</i>	Q2
Dana riset terbatas	Penelitian & publikasi	Konsorsium hibah lintas PT/lembaga	Q2–Q4

G. Catatan Penutup Temuan Audit

1. **Konsistensi RENOP sebagai *living document*.** RENOP terbukti menjadi instrumen kerja operasional dan acuannya jelas secara legal-formal (SK Dekan), sehingga

memudahkan *alignment* target–program–evidence.

2. **IKU komprehensif dan terukur.** Tabel IKU mencakup akreditasi, kelulusan, IPK, serdos, publikasi, PkM, MoU, AMI, tracer, dan sarpras memudahkan audit berbasis bukti.
3. **Fokus peningkatan 2024/2025.** (i) Digitalisasi mutu/e-audit, (ii) internasionalisasi riset & database hukum (HeinOnline/LexisNexis), (iii) penguatan *policy-lab* & alumni untuk *career pipeline*.

Kekuatan utama terletak pada komitmen pimpinan, disiplin SPMI, dan produktivitas tridharma yang termonitor. Kelemahan bersifat operational enabler (digitalisasi mutu, LMS, sertifikasi staf) sehingga relatif cepat ditangani dengan RTL yang tepat. Peluang kemitraan hukum dan dukungan kebijakan internal memperbesar potensi lompatan kinerja, sementara ancaman eksternal (kompetisi lokal dan dana riset) dapat dikelola dengan strategi diferensiasi kurikulum, konsorsium riset, dan penguatan brand akademik prodi. Dengan demikian, dasar untuk continuous quality improvement pada RENOP 2023/2024 telah kokoh dan terarah

VII. PENUTUP

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) telah berjalan sesuai dengan prinsip dan siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis pendekatan PPEPP — Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Audit ini menjadi sarana evaluasi sistematis terhadap kinerja tridharma perguruan tinggi, sekaligus wujud komitmen Fakultas Hukum dalam menegakkan budaya mutu akademik dan tata kelola kelembagaan yang transparan serta akuntabel.

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan tujuan menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, telah sesuai dengan Rencana Operasional (RENOP) Tahun Akademik 2022/2023, yang merupakan turunan langsung dari RENSTRA Fakultas Hukum UPMI 2020–2025. Seluruh tahapan audit — mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil, hingga rapat tinjauan manajemen (RTM) — terlaksana dengan baik, melibatkan semua unsur sivitas akademika dan difasilitasi secara profesional oleh LP3M UPMI. Proses audit ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap standar, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran kelembagaan (organizational learning). Melalui audit, seluruh pihak memperoleh gambaran obyektif tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, sekaligus menentukan strategi peningkatan mutu berkelanjutan ke depan.

Hasil audit menunjukkan bahwa **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI** telah mampu melaksanakan RENOP secara **efektif dan terukur**, dengan rata-rata **tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 97,1%**, meningkat dari tahun akademik sebelumnya yang berada pada kisaran 88,6%. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan SPMI, efektivitas dalam pengelolaan tridharma, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dari sembilan bidang utama yang diaudit, tujuh bidang menunjukkan capaian “**Sangat Baik**”, satu bidang “**Baik**”, dan satu bidang “**Cukup Baik**”, sebagaimana dirinci berikut ini:

No	Bidang Audit	Capaian (%)	Kategori Kinerja	Keterangan
1	Akademik & Kurikulum	85	Sangat Baik	Implementasi OBE mencapai 85%, di atas target RENOP 80%.
2	Penelitian & Publikasi Ilmiah	90	Baik	Publikasi meningkat, perlu lebih banyak riset kolaboratif.
3	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	120	Sangat Baik	PkM berbasis riset hukum melampaui target.
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	100	Sangat Baik	3 dosen tersertifikasi pendidik, 1 dalam proses.
5	Tata Kelola & Keuangan	92	Sangat Baik	Transparansi dan efisiensi meningkat.
6	Kerja Sama & Networking	90	Baik	4 MoU aktif, 1 <i>joint research</i> internasional.
7	Penjaminan Mutu	100	Sangat Baik	AMI terlaksana penuh dengan RTL disahkan Senat.
8	Sarana & Prasarana	95	Cukup Baik	Fasilitas lengkap, e-library perlu peningkatan.
9	Kemahasiswaan & Alumni	102	Sangat Baik	87% kelulusan tepat waktu, IPK rata-rata 3.41.

Rata-rata keseluruhan capaian IKU: 97,1% Kategori Umum Kinerja: Sangat Baik

Secara umum, hasil tersebut menggambarkan peningkatan kinerja Fakultas Hukum UPMI baik dari aspek akademik, riset, maupun tata kelola lembaga. Hasil audit ini juga menegaskan bahwa sistem mutu internal telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap reputasi akademik serta kepercayaan publik terhadap Program Studi Ilmu Hukum.

Analisis Implikasi dan Dampak Audit

- 1. Terhadap Mutu Akademik:** Implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan KKNI Level 8 telah memperkuat relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan masyarakat hukum nasional dan dunia kerja akademik. Penerapan asesmen berbasis kinerja (performance-based assessment) mulai membentuk kultur belajar yang lebih reflektif dan analitis di kalangan mahasiswa.
- 2. Terhadap Riset dan Publikasi Ilmiah:** Keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam penelitian berbasis kebijakan publik hukum meningkatkan kapasitas penelitian dan visibilitas akademik Fakultas Hukum UPMI. Tren peningkatan publikasi di jurnal nasional terakreditasi menandai kematangan budaya riset yang semakin kuat.
- 3. Terhadap Pengabdian Masyarakat:** Kegiatan PkM berbasis hasil riset telah menunjukkan dampak sosial nyata, terutama dalam bidang advokasi hukum, literasi hukum digital, dan pemberdayaan masyarakat hukum. Hal ini memperkuat posisi UPMI sebagai institusi yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat Sumatera Utara.
- 4. Terhadap SDM dan Tata Kelola:** Peningkatan jumlah dosen bersertifikasi dan upaya percepatan studi lanjut doktoral memperkuat kapasitas akademik Fakultas Hukum. Sementara itu, tata kelola keuangan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menunjukkan transparansi dan efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal.

5. **Terhadap Penjaminan Mutu Internal:** Pelaksanaan AMI yang sistematis menjadi bukti bahwa siklus mutu internal telah berfungsi dengan baik. Kehadiran Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan koordinasi dengan LP3M memperkuat sinergi antarunit dalam menjaga mutu akademik dan administratif.

Dari pelaksanaan audit tahun akademik 2022/2023, terdapat sejumlah *lesson learned* penting yang dapat menjadi landasan untuk peningkatan berkelanjutan:

1. **Digitalisasi Mutu sebagai Prioritas Strategis.** Keterbatasan dalam digitalisasi dokumen mutu menegaskan perlunya pengembangan *e-Audit system* terintegrasi yang memudahkan pelacakan data, bukti, dan tindak lanjut audit.
2. **Penguatan Literasi Digital Akademik.** Sebagian dosen dan staf perlu dilatih untuk lebih optimal menggunakan Learning Management System (LMS) dan sistem informasi akademik, agar bukti pelaksanaan OBE dan pembelajaran daring lebih mudah diverifikasi.
3. **Peningkatan Profesionalisasi SDM.** Perluasan sertifikasi mutu dan pelatihan ISO 21001:2018 bagi tenaga administrasi akan mempercepat pembentukan sistem manajemen mutu yang terstandarisasi secara internasional.
4. **Integrasi Kolaborasi Riset Internasional.** MoU dan *joint research* dengan lembaga hukum luar negeri (misalnya UKM Malaysia) menjadi peluang strategis yang harus difasilitasi dengan dukungan dana riset lintas institusi.
5. **Penguatan Jejaring Alumni dan Stakeholder.** Pembentukan *Ikatan Alumni Program Studi Ilmu Hukum (IKA-MIH UPMI)* diharapkan dapat meningkatkan kontribusi alumni dalam kegiatan karier, magang, dan PkM berbasis jejaring profesional.

Sebagai hasil akhir dari siklus AMI Tahun Akademik 2022/2023, dirumuskan beberapa arah kebijakan strategis untuk pelaksanaan **Rencana Operasional Tahun Akademik 2023/2024**,

yaitu:

1. **Transformasi Digital Mutu Akademik.** Mengimplementasikan sistem *e-Audit* berbasis Google Workspace/LMS dan repositori mutu daring, agar seluruh dokumen PPEPP, RPS, dan laporan AMI terdigitalisasi secara terstruktur.
2. **Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.** Menargetkan minimal dua dosen memperoleh beasiswa S3 dan dua staf administrasi lulus sertifikasi ISO 21001:2018 atau SPMI.
3. **Internasionalisasi Riset dan Kurikulum.** Meningkatkan jumlah publikasi internasional bereputasi (Scopus/WoS) dan menambahkan mata kuliah *Comparative Legal System* dan *Legal Technology and AI* pada revisi kurikulum 2025.
4. **Pengembangan Infrastruktur Pembelajaran.** Meningkatkan kapasitas e-library dengan database hukum internasional (HeinOnline, LexisNexis) dan memperluas *smart classroom* berbasis hybrid learning.
5. **Sustainability Program Penjaminan Mutu.** Menjadikan AMI bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan siklus berkelanjutan dengan *real-time monitoring* dan *data-driven decision making* berbasis KPI digital.

Secara keseluruhan, hasil **Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023** membuktikan bahwa **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI** telah melaksanakan RENOP dengan tingkat efektivitas dan kesesuaian yang sangat baik. Capaian IKU sebesar **97,1%** menandakan keberhasilan program dalam menjaga mutu tridharma, meningkatkan reputasi akademik, dan memperkuat tata kelola institusional yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Audit Mutu Internal ini tidak hanya menjadi dokumen evaluatif, tetapi juga **cermin kematangan sistem manajemen mutu Fakultas Hukum UPMI**. Hasil audit diharapkan

menjadi pedoman strategis bagi seluruh unit kerja dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan mutu, baik di tingkat akademik, riset, maupun tata kelola kelembagaan.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat menjadikan hasil audit sebagai **acuan dalam membangun budaya mutu yang kokoh, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman**. Komitmen bersama untuk menjaga mutu, meningkatkan daya saing, dan memperluas dampak sosial dari pendidikan hukum merupakan kunci keberlanjutan dan kemajuan Fakultas Hukum UPMI ke depan.



**BERITA ACARA RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI) TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

A. Hari, Tanggal, dan Tempat

- Hari/Tanggal : Senin, 12 November 2023
- Waktu : Pukul 09.00 – 13.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Fakultas Hukum UPMI, Lantai II Gedung Fakultas Hukum, Jl. Teladan No. 15 Medan

B. Agenda Rapat

Rapat Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun Akademik 2022/2023. Agenda utama rapat meliputi:

1. Penyampaian hasil audit mutu internal oleh Tim Auditor Internal LP3M UPMI.
2. Pembahasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RENOP 2022/2023.
3. Identifikasi temuan, ketidaksesuaian, dan area perbaikan.
4. Perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI.
5. Penetapan kesimpulan dan rekomendasi peningkatan mutu untuk Tahun Akademik 2024/2025.

C. Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Dekan Fakultas Hukum UPMI	Pimpinan Rapat
2	Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M.	Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum	Sekretaris Rapat
3	Dr. Ismayani, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Auditee
4	Dr. Yusuf Pasaribu, S.H., M.H	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	Auditee
5	Dr. Abdul Rokhim, S.H., M.H.	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	Anggota Rapat
6	Yulkarnaini Siregar, SH.,M.Hum	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	Anggota Rapat
7	Taufika Hidayati, SH.,S.Pd.,M.Kn	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	Anggota Rapat
8	Jenda Ingan Mahuli, SH.,M.Hum	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	Anggota Rapat
7	Dra. Saima Rambe, M.Si	Tenaga Kependidikan	Notulen
8	Rizki Rialdi, S.E	Tenaga Kependidikan	Anggota Rapat
9	Iskandarsyah	Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum	Peserta Observasi
10	Muliawansyah	Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum	Peserta Observasi

D. Jalannya Rapat

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh **Dekan Fakultas Hukum UPMI** pada pukul 09.00 WIB dengan sambutan pembuka yang menekankan pentingnya pelaksanaan audit sebagai bagian dari siklus mutu internal. Disampaikan pula bahwa AMI bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sarana refleksi bersama untuk memperkuat tata kelola akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum.

- 2. Pemaparan Hasil Audit Mutu Internal** Ketua Unit Penjaminan Mutu menyampaikan hasil pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2022/2023 yang telah dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal LP3M. Berdasarkan hasil audit, rata-rata capaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Program Studi Ilmu Hukum mencapai **97,1%** dengan kategori “**Sangat Baik**”. Bidang yang memperoleh capaian tertinggi adalah **Pengabdian kepada Masyarakat (120%)**, sedangkan bidang yang masih memerlukan peningkatan adalah **Sarana dan Prasarana (95%)**.
- 3. Pembahasan Temuan dan Analisis** Tim auditor memaparkan beberapa temuan penting, di antaranya:

- Proses **digitalisasi dokumen mutu** masih parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya ke sistem LMS.
- **Sebagian dosen belum optimal menggunakan Learning Management System (LMS)** dalam pembelajaran berbasis OBE.
- **Tenaga administrasi** belum memiliki sertifikasi mutu ISO 21001/SPMI.
- Masih terdapat **keterbatasan akses database hukum internasional** pada e-library.

Pimpinan Fakultas Hukum menegaskan perlunya prioritas terhadap transformasi digital mutu dan peningkatan kompetensi SDM administrasi agar siklus mutu dapat berjalan efektif dan efisien.

4. **Perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL)** Berdasarkan hasil diskusi, disepakati beberapa langkah perbaikan strategis sebagai berikut:

No	Bidang	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	Akademik & Kurikulum	Pelatihan lanjutan OBE & penyusunan RPS digital	GKM & Kaprodi MIH	Des 2023
2	Penelitian	Pengajuan hibah riset kolaboratif ke BRIN & Dikti	LP3M & Dosen MIH	Jan 2024
3	PkM	Ekspansi kegiatan hukum masyarakat ke Nias & Simalungun	LPPM & Mahasiswa	Mar 2024
4	Penjaminan Mutu	Penerapan sistem <i>e-Audit</i> berbasis LMS	UPM Fakultas Hukum	Feb 2024
5	SDM & Keuangan	Sertifikasi ISO/SPMI bagi 2 staf administrasi	Dekan Fakultas Hukum	Apr 2024
6	Sarana Prasarana	Pengadaan database hukum HeinOnline & LexisNexis	Biro Umum & Fakultas Hukum	Mei 2024

Kesimpulan dan Penetapan Hasil Rapat

- Hasil AMI Tahun Akademik 2022/2023 ditetapkan dengan capaian rata-rata 97,1% (**kategori “Sangat Baik”**).
- Disepakati bahwa Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil audit akan dimasukkan ke dalam **RENOP Fakultas Hukum Tahun Akademik 2023/2024**.
- Rapat menyetujui pelaksanaan **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** lanjutan pada bulan November 2023 untuk menilai efektivitas pelaksanaan RTL.

Rapat ditutup pada pukul **13.00 WIB** oleh **Dekan Fakultas Hukum UPMI** dengan harapan bahwa seluruh unit kerja dapat menindaklanjuti hasil AMI secara konsisten dan terukur.

Hasil dan Keputusan Rapat

1. Hasil AMI disetujui dan disahkan oleh peserta rapat.
2. Rencana Tindak Lanjut (RTL) menjadi bagian integral dari penyusunan RENOP 2023/2024.
3. Penguatan *digital quality management system* ditetapkan sebagai prioritas strategis Fakultas Hukum UPMI tahun depan.

Penutup

Demikian **Berita Acara Rapat Audit Mutu Internal (AMI)** ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dokumen resmi dalam laporan pelaksanaan SPMI Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Medan, 12 November 2023

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

Zetria Erma, SH.,M.Hum

Mengetahui,
Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum

Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E, S.H., M.M., M.H



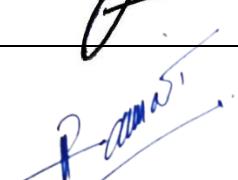
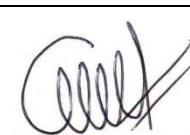
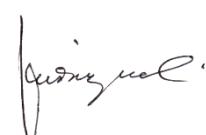
DAFTAR HADIR

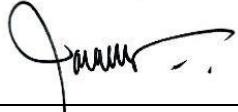
Tanggal : Senin, 12 November 2023

Lokasi : Ruang Rapat Fakultas Hukum UPMI

Agenda Rapat : Audit Mutu Internal (AMI) Prodi S2 Program Studi Ilmu Hukum UPMI.

Tahun Akademik 2022/2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Dekan Fakultas Hukum UPMI	
2	Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M.	Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum	
3	Dr. Ismayani, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	
4	Dr. Yusuf Pasaribu, S.H., M.H	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	
5	Dr. Abdul Rokhim, S.H., M.H	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	
6	Yulkarnaini Siregar, SH.,M.Hum	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	
7	Taufika Hidayati, SH.,S.Pd.,M.Kn.	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	
8	Jenda Ingan Mahuli, SH.,M.Hum	Dosen Tetap Prodi Prodi Ilmu Hukum	

9	Dra. Saima Rambe, M.Si	Tenaga Kependidikan	
10	Rizki Rialdi, S.E	Tenaga Kependidikan	
11	Iskandarsyah	Himpunan Mahasiswa Prodi Prodi Ilmu Hukum	

Medan, 12 November 2023

Dekan Fakultas Hukum UPMI



Zetria Erma, SH.,M.Hum



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

KAMPUS TERPADU : JL. BALAI DESA PASAR 12 MARINDAL 2 MEDAN

www.upmi.ac.id

Nomor: 155/06.D/FH-UPMI/XI/2023

Prihal : **UNDANGAN RAPAT AMI T.A 2022/2023**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Mahasiswa

- 1) Ketua Prodi Program Studi Ilmu Hukum
- 2) Dosen Tetap Prodi S2 Ilmu Hukum
- 3) Himpunan Mahasiswa Prodi Program Studi Ilmu Hukum

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan rapat audit internal yang akan dilaksanakan pada:

- a. Hari/Tanggal: Senin, 12 November 2023
- b. Waktu: 09.00 WIB s.d. selesai
- c. Tempat: Ruang Rapat Fakultas Hukum UPMI
- d. Agenda: Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kehadiran Bapak/Ibu/Mahasiswa tepat waktu serta membawa dokumen pendukung terkait pelaksanaan standar mutu internal yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Mahasiswa diucapkan terima kasih.

Medan, 1 November 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia



Zetria Erma, SH.,M.Hum

Dokumentasi Kegiatan

